

**SUBSTANSI**  
**PEMERINTAH DIGITAL**  
**DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026**

Bukti Dukung Indikator 1 - Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital  
Level 1 (Merintis)

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**2026**

## A. Maksud Penyusunan

Dokumen ini disusun sebagai bukti dukung untuk Indikator 1 Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital pada Level 1 (Merintis). Dokumen ini menunjukkan bahwa substansi Pemerintah Digital telah termuat dalam dokumen perencanaan Kabupaten Murung Raya dan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Digital secara bertahap.

Dokumen ini bukan pengganti RPJMD, Renstra, maupun Rencana Aksi Pemerintah Digital. Dokumen ini berfungsi sebagai kompilasi relevansi untuk memudahkan penelusuran substansi Pemerintah Digital oleh Tim Asesor Internal dan asesor eksternal.

## B. Dokumen Sumber

No.	Dokumen Sumber	Kedudukan dalam Bukti Level 1
1	Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	Menunjukkan arah pembangunan daerah, sasaran reformasi tata kelola, target Indeks SPBE, dan akses internet.
2	Perbup Murung Raya Nomor 37 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Menetapkan Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD dan pedoman Renja/RKPD.
3	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2025-2029	Memuat tujuan, sasaran, tahapan pembangunan, serta program/kegiatan terkait Pemerintah Digital.

Tabel 1. Data Sumber

## C. Matriks Relevansi Substansi Pemerintah Digital

No.	Substansi Pemdi	Dasar pada Dokumen	Relevansi terhadap Bukti Level 1
1	Tata kelola dan transformasi digital	Renstra Diskominfo hal. 35: tujuan “tata kelola pemerintahan digital yang aman, terbuka, dan berbasis data”.	Membuktikan arah substansi Pemdi telah dirumuskan dalam perencanaan perangkat daerah.
2	Target kinerja Pemerintah Digital	Renstra Diskominfo hal. 35: target Indeks Pemerintah Digital; RPJMD hal. 531: target Indeks SPBE 2026-2030.	Membuktikan adanya target kinerja terukur yang berkaitan dengan transformasi digital.
3	Arsitektur, peta rencana, proses bisnis, dan perencanaan/anggaran SPBE	Renstra Diskominfo hal. 51: program koordinasi kebijakan tata kelola SPBE, termasuk arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran.	Menunjukkan substansi tata kelola Pemdi telah masuk ke program/kegiatan perangkat daerah.
4	Pembangunan layanan digital dan pemanfaatan data	Renstra Diskominfo hal. 42: tahap 2026 penataan fondasi, 2027 layanan digital, 2028 integrasi dan pemanfaatan data.	Membuktikan tahapan transformasi digital telah direncanakan secara bertahap.
5	Keamanan informasi dan statistik sektoral	Renstra Diskominfo hal. 35 dan 52: sasaran keamanan informasi serta data/statistik berbasis arsitektur.	Membuktikan cakupan substansi Pemdi tidak hanya aplikasi, tetapi data dan keamanan.
6	Perbaikan tata kelola SPBE	RPJMD hal. 161: masih diperlukan optimalisasi perencanaan strategis, TIK, penyelenggara, manajemen SPBE, dan audit TIK.	Menunjukkan permasalahan/ gap yang menjadi dasar penyusunan substansi Pemdi.

Tabel 2. Substansi

## D. Cuplikan Dokumen dan Penjelasan Relevansi

### 1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Digital

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029, hal. 35

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TAR		
					2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, terbuka, dan berbasis data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya		Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2,62	2,70	2,90	3,
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE (terkait Tata Kelola)	3,10	3,15	3,20	3,
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan tepat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	2,40	2,50	2,

Cuplikan sumber yang relevan - area berwarna kuning merupakan substansi yang digunakan.

Gambar 1. Renstra Diskominfo dengan substansi SPBE dan PEMDI

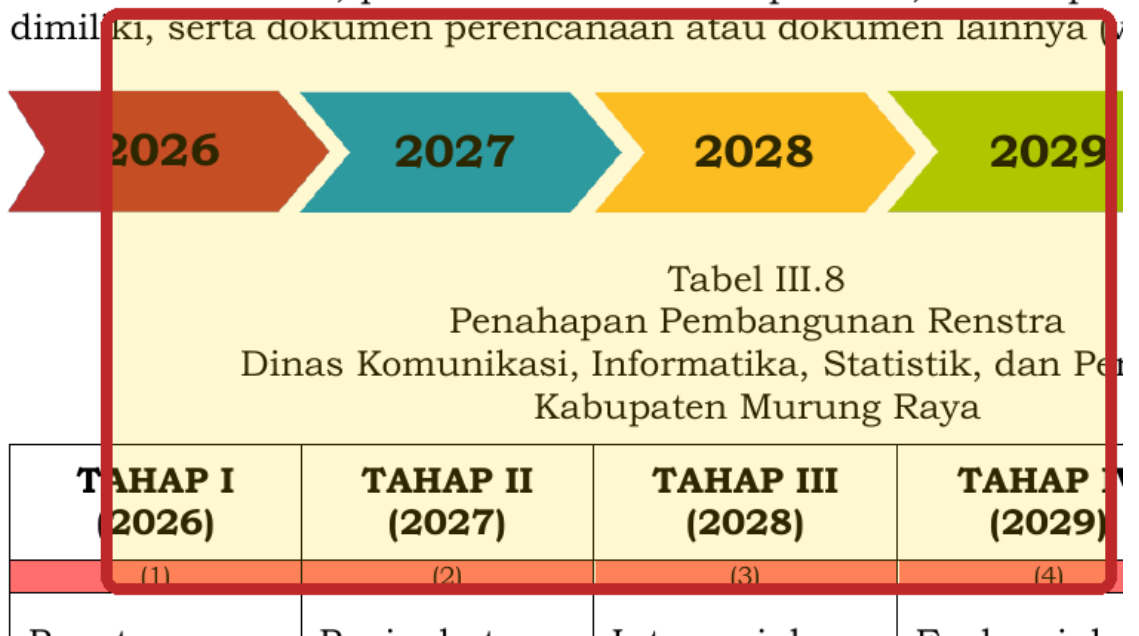
Cuplikan ini menunjukkan bahwa tujuan Renstra Diskominfo telah secara eksplisit mengarah pada tata kelola pemerintahan digital yang aman, terbuka, dan berbasis data. Target Indeks Pemerintah Digital juga telah dicantumkan secara bertahap. Ini merupakan bukti paling langsung bahwa substansi Pemdi telah masuk dalam perencanaan perangkat daerah.

## 2. Tahapan Transformasi Digital

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029, hal. 42

Penahapan pembangunan merupakan prioritas per yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dan s Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabu Penahapan ini mengacu pada proses pembangunan yang d tahap tahunan secara terstruktur dan terencana guna m tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, serta r monitoring dan evaluasi.

Tahapan pembangunan tersebut tersaji pada Tabel memperhatikan : tahapan pembangunan pada RPJMD Kabu Tahun 2025-2029, prioritas nasional dan provinsi, kemampuan dimiliki, serta dokumen perencanaan atau dokumen lainnya (



Cuplikan sumber yang relevan - area berwarna kuning merupakan substansi yang digunakan.

Gambar 2. Tahapan Renstra Diskominfo dengan substansi SPBE dan PEMDI

Tahapan pembangunan menetapkan tahun 2026 sebagai penataan awal dan penguatan fondasi infrastruktur serta layanan digital. Tahap ini relevan dengan kondisi Level 1 karena menunjukkan substansi Pemdi sedang dipersiapkan dan diturunkan secara bertahap.

### 3. Program Tata Kelola SPBE

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029, hal. 51

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		KUALITAS	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
						Jumlah dokumen kebijakan tata kelola spbe meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran spbe pemerintah daerah
						Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota

Cuplikan sumber yang relevan - area berwarna kuning merupakan substansi yang digunakan.

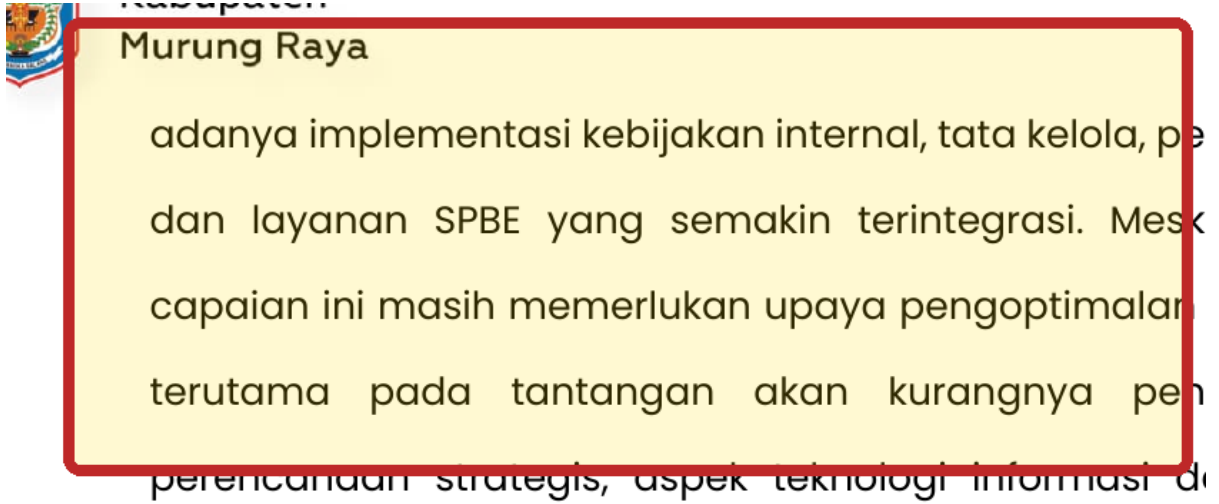
Gambar 3. Program Tata Kelola SPBE Pada Renstra Diskominfo

Renstra telah memuat indikator dan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE yang mencakup arsitektur, peta rencana, proses bisnis, penyusunan rencana, serta anggaran SPBE Pemerintah Daerah. Bagian ini menjadi dasar terkuat untuk menyatakan substansi Pemdi telah terdapat dalam perencanaan.



## 5. Permasalahan

Sumber: RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, hal. 161



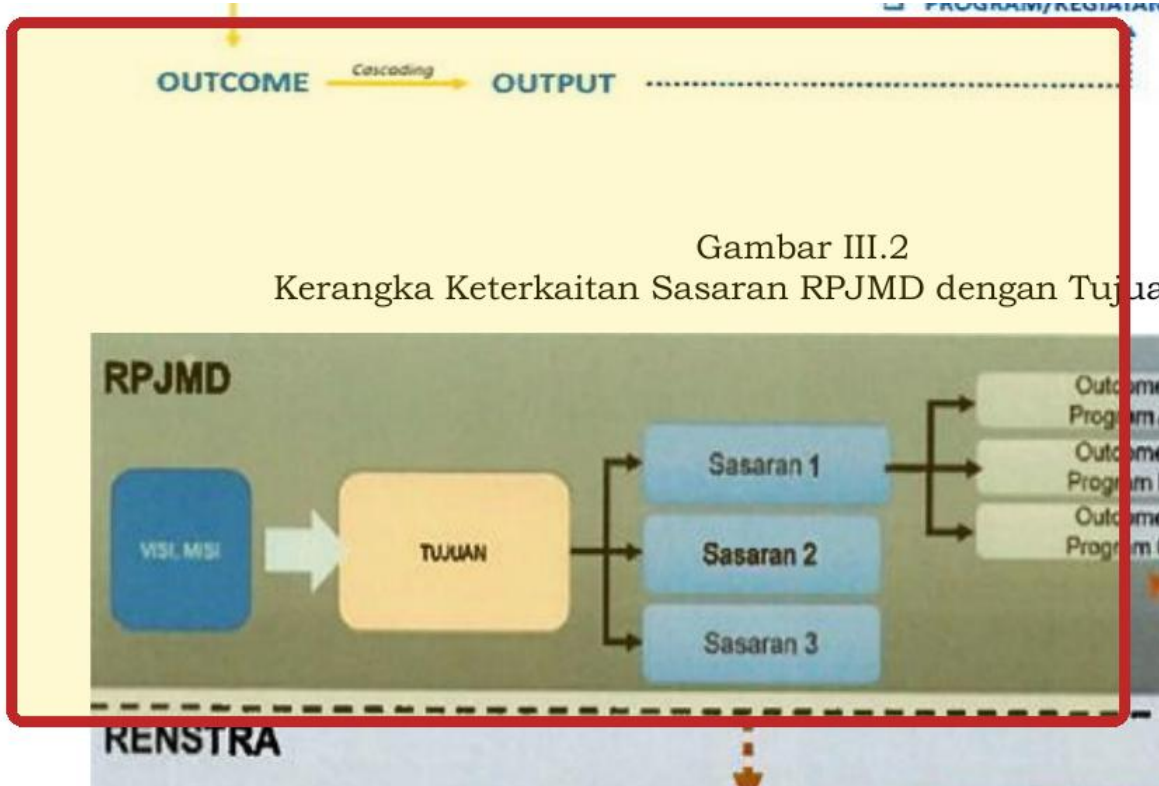
*Cuplikan sumber yang relevan - area berwarna kuning merupakan substansi yang digunakan.*

Gambar 4. Permasalahan

RPJMD mengidentifikasi kebutuhan pengoptimalan pada perencanaan strategis, TIK, penyelenggara SPBE, manajemen SPBE, dan audit TIK. Identifikasi ini dapat digunakan sebagai dasar masalah dan prioritas penyusunan substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital.

## 6. Keterkaitan RPJMD dan Renstra

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029, hal. 34



Cuplikan sumber yang relevan - area berwarna kuning merupakan substansi yang digunakan.

Gambar 4. Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Diskominfo

Bagan menunjukkan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra. Hal ini mendukung penjelasan bahwa substansi Pemerintah Digital dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari arah pembangunan daerah.

## E. Kesimpulan untuk Pengisian Level 1 (Merintis)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2025-2029, substansi Pemerintah Digital telah termuat dalam arah pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah. Substansi tersebut meliputi tata kelola digital, layanan digital, arsitektur dan peta rencana SPBE, proses bisnis, data/statistik, keamanan informasi, target Indeks SPBE/Pemdi, serta rencana dan anggaran SPBE.

Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bukti Level 1/Merintis, dengan narasi bahwa substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital Kabupaten Murung Raya sedang diselaraskan dan dirumuskan lebih lanjut secara bertahap berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku.